



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI SENIN, 26 OKTOBER 2026



RINGKASAN BERITA HARI INI

Menanti Akhir Macet di Gedangan

► Flyover Proyek Besar Penantian Panjang

SIDOARJO, SURTA - Bertahun-tahun menjadi langganan kemacetan, Perempatan Gedangan di Kabupaten Sidoarjo akhirnya mendapat harapan baru. Rencana pembangunan flyover pada 2027 mendiang diibaratkan menjadi jalan keluar dari antrean kendaraan yang selama ini menyita waktu, tenaga, dan biaya perjalanan.

Klasek kendaraan bernomor sabutan di antara ratusan mobil, truk, trailer, kontainer, bus, dan sepeda motor yang mengular. Pemadatan itu menjadi kemacetan di Perempatan Gedangan. Bukan hanya satu jalur, kemacetan terjadi di empat penjuru jalan, terutama saat jam-jam sibuk.

Kondisi demikian telah berlangsung bertahun-tahun. Harapan baru muncul setelah pemerintah memutuskan membangun flyover di atas perempatan yang menjadi salah satu titik kemacetan paling parah di Kabupaten Sidoarjo. Pembangunan flyover direncanakan mulai 2027, sementara proses pembebasan lahan telah berjalan sebagai tahap persiapan.

"Semua pembangunan Flyover Gedangan berjalan sesuai jadwal, tidak ada keterlambatan dan penundaan," kata Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo. Pembangunan flyover ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan di kawasan ini.

Menurutnya, kemacetan di Gedangan bukan sekadar hambatan lalu lintas, melainkan persoalan harian yang menyita waktu, tenaga, dan biaya operasional. "Setiap hari kalau lewat Perempatan Gedangan harus sedia waktu ekstra. Makanya, kalau flyover itu benar-benar selesai, tentu sangat membantu mobilitas kami yang kerja di Surabaya," lanjutnya.

Sampai Gedangan memang merupakan salah satu titik macet terbesar di kawasan ini. Kondisi ini diperparah oleh keberadaan perempatan yang menjadi titik pertemuan jalur tol, jalan nasional, dan jalan provinsi. "Setiap kali lewat Gedangan, antrean kendaraan berpetak-makam panjang," kata dia.

"Harapannya, semua pembangunan flyover itu segera terlaksana. Agar macet langgan di kawasan ini tidak terus-menerus terjadi," ujar Bintang, warga Sidoarjo yang juga bekerja di Surabaya.

Pembangunan jembatan layang tersebut diharapkan tidak hanya mengurangi kemacetan, tetapi juga meningkatkan efisiensi logistik di kawasan industri Sidoarjo. Waktu tempuh yang selama ini terbuang puluhan menit diharapkan dapat dipangkas, khususnya bahan baku kendaraan di kawasan ini, dan risiko kecelakaan berkurang. (ed)

Tambahan Rp 210 M dan Desain Enam Lajur

Flyover Gedangan disetujui bukan sekadar untuk mengurangi kemacetan, melainkan juga untuk menambah anggaran pembebasan lahan sebesar Rp 210 juta. Hal ini sesuai dengan rencana anggaran APBD 2027, sementara desain pembangunan flyover ditinjau dengan ruang lingkup yang lebih luas, yakni enam lajur, dan akan selesai dalam waktu 30 tahun ke depan.

Anggaran tambahan itu menjadi bagian dari upaya pembebasan lahan untuk pembangunan flyover. Di sisi lain, pemerintah juga meninjau desain flyover agar kapasitas jalan yang dibangun tidak cepat mencapai titik jenuh.

Angka dalam Anggaran Bangkit DPRD Sidoarjo, Sulaiman Hadi Nurmanan, mengatakan, alokasi tambahan dana itu telah masuk dalam rencana yang dibahas Tim Anggaran Pemkab Sidoarjo bersama DPRD Sidoarjo.

"Sekarang ini masih proses pembahasan untuk APBD 2027. Ada anggaran sekitar Rp 210 juta yang kita siapkan untuk tambahan lahan pembebasan lahan dalam proyek pembangunan Flyover Gedangan. Ini masih rencana, karena masih APBD yang belum disahkan menjadi APBD," ungkap Wawan, pengisian Sulaiman Hadi Nurmanan.

Menurut politisi PKS asal Sukodono, dana itu masih berproses. "Kita sebagai DPRD akan terus memantau prosesnya. Kalau sudah selesai, tentu akan membantu masyarakat yang lewat di kawasan ini," kata dia.

Proses pembebasan lahan sedang berjalan. Sebagian lahan akan dibayar pada 2026 menggunakan anggaran tersebut, sedangkan sisanya akan dibayar pada awal 2027 dengan dana yang disalurkan dari APBD 2027.

"Langkah ini diambil guna memastikan pembebasan lahan untuk pembangunan flyover berjalan lancar. Kami akan terus memantau prosesnya. Kalau sudah selesai, tentu akan membantu masyarakat yang lewat di kawasan ini," kata dia.

Wawan menyebut, pembangunan jembatan layang Gedangan sangat mendesak. Kawasan ini telah lama menjadi langganan kemacetan karena letaknya strategis, terutama pada pagi dan sore hari. "Kalau proses pembebasan lahan yang ditunda, tentu akan berdampak pada pembangunan flyover. Kami akan terus memantau prosesnya. Kalau sudah selesai, tentu akan membantu masyarakat yang lewat di kawasan ini," kata dia.

Melalui APBD 2026, Pemkab Sidoarjo telah mengalokasikan Rp 200 juta untuk pembebasan lahan. Anggaran itu kemudian ditambah Rp 25 juta melalui perubahan anggaran keuangan (PAK), sehingga total dana yang disalurkan pada tahun ini mencapai Rp 225 juta.

Proses pembebasan lahan sedang berjalan. Sebagian lahan akan dibayar pada 2026 menggunakan anggaran tersebut, sedangkan sisanya akan dibayar pada awal 2027 dengan dana yang disalurkan dari APBD 2027.

"Langkah ini diambil guna memastikan pembebasan lahan untuk pembangunan flyover berjalan lancar. Kami akan terus memantau prosesnya. Kalau sudah selesai, tentu akan membantu masyarakat yang lewat di kawasan ini," kata dia.



LANGGANAN MACET - Kondisi Perempatan Gedangan yang menjadi langganan macet. Tahun depan pemerintah bakal membangun flyover atau jembatan layang di atas perempatan tersebut.



RAPAT BERSAMA: Warga Desa Miliriprowo menghadiri musdes yang digelar di balai desa, Sabtu (24/10) malam.

Persoalan ini cukup mengganggu. Tidak semua urusan administrasi bisa langsung kami selesaikan."

Haris Ridwan
Sekdes Miliriprowo

Karena APBDes belum dibuat, dana desa tidak bisa dicairkan."

Muhammad Ainur Rahman
Pj Sekda Sidoarjo

Dana Desa Gagal Cair karena APBDes Belum Disahkan

DUA bulan lagi sudah berganti tahun. Namun, hingga kini APBDes Miliriprowo tahun 2026 belum disahkan. Gara-gara perencanaan tak ditetapkan, alokasi dana desa (ADD) dan dana desa gagal dicairkan.

Pj Sekda Sidoarjo Muhammad Ainur Rahman mengatakan, persoalan ini harus segera diselesaikan mengingat waktu pelaksanaan anggaran 2026 tinggal sekitar dua bulan. Dana desa seharusnya digunakan untuk membiayai pembangunan, kegiatan masyarakat dan penyelesaian masalah.

lenggaraan pemerintahan desa. "Karena APBDes belum dibuat, dana desa tidak bisa dicairkan," katanya.

Ainur mengingatkan, keterlambatan penetapan APBDes 2027 juga bisa berdampak pada alokasi dana desa tahun depan. Karena itu, ia meminta BPD dan pemerintah desa segera mencari jalan keluar agar masalah tidak berlarut-larut. "Harus diusahakan selesai, supaya tahun depan bisa tidak terpengang lagi," tambah Ainur.

Sekdes Miliriprowo Haris Ridwan menyebut, pemotongan anggaran tahun depan mencakup ADD dan dana desa. ADD Desa Miliriprowo yang bersumber dari APBD sebesar Rp 578,19 juta, sedangkan dana desa mencapai Rp 322,75 juta. Jika ditotal anggaran dari dua sumber tersebut mencapai Rp 900,94 juta.

Menurut Aris, tidak adanya anggaran dari Pemkab dan pemerintah pusat tentu berdampak pada pembangunan. "Program pembangunan tak berjalan karena APBDes tak disahkan," jelas Aris. (ful/hen)



IKON: Bupati Sidoarjo Subandi sedang meninjau lokasi di Desa Wadungasri, Kecamatan Waru, Jumat (23/10).

Pemkab Bakal Bangun Gapura Jenggala Berukuran Besar

■ Di Perbatasan Pondok Candra

KOTA-Perbatasan Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya bakal memiliki wajah baru. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo berencana membangun Gapura Jenggala berukuran besar di kawasan Pondok Candra, Desa Wadungasri, Kecamatan Waru.

Tak sekadar menjadi penanda batas wilayah, gapura tersebut diproyeksikan menjadi ikon daerah yang mengangkat sejarah dan kearifan lokal Sidoarjo.

Rencana pembangunan gapura berukuran besar itu ditinjau langsung oleh Bupati Sidoarjo Subandi di lokasi, Jumat (23/10). Kawasan tersebut merupakan titik perbatasan Desa Wadungasri, Kecamatan Waru, Sidoarjo, dengan Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya.

Subandi menyampaikan, penataan kawasan perbatasan perlu dilakukan agar batas administrasi kedua daerah terlihat lebih jelas. Selain itu, kawasan tersebut diharapkan tampil lebih tertata, estetis, sekaligus memiliki identitas yang kuat.

"Kita ingin mengembalikan nilai-nilai lokal di situ, supaya batas wilayah Surabaya dan Sidoarjo terlihat jelas, sekaligus mengangkat kembali sejarah Sidoarjo," ujarnya.

Secara fisik, Gapura Jenggala direncanakan memiliki lebar minimal 2,5 meter dengan bentang panjang sekitar 7 hingga 8 meter. Namun, dimensi final bangunan masih akan disesuaikan dengan daya dukung dan kondisi riil di lapangan.

Pemkab Sidoarjo akan membahas lebih lanjut rencana tersebut bersama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPU-BMSDA). Pembahasan mencakup pematangan desain agar bangunan tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga merepresentasikan identitas dan narasi sejarah daerah. (dik/vga)

Kades Kalimati Dituding Selewengkan Bansos Beras

KOTA-Tuduhan penggelapan dan penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) beras pangan yang menyeret Kepala Desa (Kades) Kalimati, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, akhirnya mendapat tanggapan langsung.

Kades Kalimati Kismo Mulyono membantah tuduhan yang beredar di media sosial tersebut dan menegaskan bahwa pihak yang menuduh tidak mampu menunjukkan bukti pendukung.

Bantahan itu disampaikan Kismo saat mengikuti hearing bersama Komisi



BUKA SUARA: Hearing Komisi D DPRD Sidoarjo.

D DPRD Sidoarjo, Jumat (23/10) sore. Dalam forum tersebut, ia menjelaskan bahwa perubahan data penerima bantuan pangan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan musyawarah desa (musdes), bukan keputusan sepihak pemerintah desa.

Kismo menyebut, tuduhan yang beredar melalui sejumlah platform media sosial, termasuk TikTok, tidak disertai data maupun dokumentasi yang dapat memperkuat dugaan kecurangan.

"Tujuan-tujuan yang katanya penggelapan, penyalahgunaan wewenang, penyelewengan, alhamdulillah hari ini tidak terbukti. Kita sudah punya data, punya tim. Ketika ditanya apakah punya data, punya dokumentasi, ternyata tidak ada," ujarnya. (dik/vga)

Kismo menyebut, tuduhan yang beredar melalui sejumlah platform media sosial, termasuk TikTok, tidak disertai data maupun dokumentasi yang dapat memperkuat dugaan kecurangan.

"Tujuan-tujuan yang katanya penggelapan, penyalahgunaan wewenang, penyelewengan, alhamdulillah hari ini tidak terbukti. Kita sudah punya data, punya tim. Ketika ditanya apakah punya data, punya dokumentasi, ternyata tidak ada," ujarnya. (dik/vga)

Menanti Akhir Macet di Gedangan

► Flyover Proyek Besar Penantian Panjang

SIDOARJO, SURYA - Bertahun-tahun menjadi langganan kemacetan, Perempatan Gedangan di Kabupaten Sidoarjo akhirnya menatap harapan baru. Rencana pembangunan flyover pada 2027 mendatang diharapkan menjadi jalan keluar dari antrean kendaraan yang selama ini menyita waktu, tenaga, dan biaya perjalanan.

Klakson kendaraan bersahut-sahutan di antara ratusan mobil, truk, trailer, kontainer, bus, dan sepeda motor yang mengular. Pemandangan itu menjadi keseharian di Perempatan Gedangan. Bukan hanya satu jalur, kemacetan terjadi di empat penjuru jalan, terutama saat jam-jam sibuk.

Kondisi demikian telah berlangsung bertahun-tahun. Harapan baru muncul setelah pemerintah memutuskan membangun flyover di atas perempatan yang menjadi salah satu titik kemacetan paling menonjol di Kabupaten Sidoarjo. Pembangunan fisik direncanakan mulai 2027, sementara proses pembebasan lahan telah berjalan sebagai tahap persiapan.

"Semoga (pembangunan Flyover Gedangan) berjalan sesuai jadwal, tidak ada keterlambatan dan penundaan," kata Dimas, warga Sukodono yang hampir setiap hari melintasi Perempatan Gedangan karena bekerja di Surabaya.

Menurutnya, kemacetan di Gedangan bukan sekadar hambatan lalu lintas, melainkan persoalan harian yang menyita waktu, tenaga, dan biaya operasional. "Setiap hari kalau lewat Perempatan Gedangan harus sedia waktu ekstra. Makanya, kalau flyover ini benar-benar terwujud, tentu sangat membantu mobilitas kami yang kerja di Surabaya," lanjutnya.

Simpang Gedangan memang merupakan salah satu urat nadi transportasi utama yang menghubungkan Sidoarjo dan Surabaya. Tingginya volume kendaraan tak sebanding dengan luas jalan yang tersedia. Kondisi itu diperparah keberadaan perlintasan sebidang kereta api tepat di sebelah persimpangan jalan nasional. Setiap kali kereta melintas, antrean kendaraan berpotensi makin panjang.

"Harapannya, semua pembangunan flyover itu segera terealisasi. Agar macet langganan di kawasan ini tidak terus-terusan terjadi," ujar Bintang, warga Sidoarjo yang juga bekerja di Surabaya.

Pembangunan jembatan layang tersebut diharapkan tidak hanya mengurai kemacetan, tetapi juga meningkatkan efisiensi logistik di kawasan industri Sidoarjo. Waktu tempuh yang selama ini terbuang puluhan menit diharapkan dapat dipangkas, konsumsi bahan bakar kendaraan ditekan, dan risiko kecelakaan berkurang. (ufi)



LANGGANAN MACET - Kondisi Perempatan Gedangan yang menjalani langganan macet. Tahun depan pemerintah bakal membangun flyover atau jembatan layang di atas perempatan tersebut.

Penentuan Nilai Ganti Rugi Lahan

SEBELUM jembatan layang berdiri di atas Perempatan Gedangan, ada pekerjaan besar yang harus dituntaskan yakni pembebasan lahan.

IPSUS

Sebanyak 122 bidang tanah di Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan masuk dalam

rencana pengadaan lahan. Warga kini menanti proses itu segera rampung, termasuk kepastian nilai ganti rugi yang akan mereka terima.

Bagi warga yang lahannya terdampak, penyelesaian pembebasan lahan menjadi tahapan penting agar pembangunan Flyover Gedangan dapat berjalan sesuai rencana. Mereka berharap prosesnya segera tuntas dan ganti rugi yang diterima layak sesuai lahan yang digunakan untuk pembangunan jembatan layang itu.

Kepala Desa Gedangan Saiful Asis menjelaskan, total ada 122 bidang yang bakal dibebaskan. Seluruhnya berada di Desa Gedangan. Jumlah itu dihitung berdasarkan sertifikat atau data kepemilikan tanah. "Bukan berarti satu rumah atau satu toko satu sertifikat. Contohnya, ada satu toko yang sertifikatnya sampai tiga, dan sebagainya," ungkap Saiful Asis.

Menurut dia, respons warga sejauh ini sangat baik terhadap rencana pembangunan Flyover Gedangan. Tidak ada penolakan, dan proses yang berjalan selama ini berlangsung lancar. Warga yang memiliki lahan terdampak kini menunggu pembebasan

lahan tuntas. Mereka juga menantikan hasil penilaian atau appraisal yang akan menentukan besaran ganti rugi atas lahan yang digunakan untuk pembangunan jembatan layang.

"Memang ada kemungkinan ketika sudah ada appraisal, bakal ada protes-protes. Mungkin merasa kurang besar atau sebagainya, tapi semua potensi itu berusaha kita petakan sejak dini. Supaya semua berjalan baik," lanjut Saiful.

Pihak desa meyakini persoalan yang berpotensi muncul masih dapat diantisipasi. Saiful merujuk pengalaman pembebasan lahan untuk pembangunan frontage road, ketika nilai appraisal atau ganti rugi yang diterima warga terbilang sangat tinggi.

Beberapa waktu lalu, sempat terjadi miskomunikasi terkait bangunan yang tidak seluruh bagiannya terkena pembebasan. Berdasarkan peta bidang dan hasil pengukuran, terdapat bangunan yang hanya terdampak sebagian.

"Ada yang sisanya kecil, ada yang sisanya masih terbilang cukup besar. Namun, yang kecil itu nanti bisa mengajukan permohonan lanjutan untuk ikut dibebaskan ketika sisanya tidak bisa dipakai untuk apa-apa," lanjutnya.

Saiful Asis menegaskan, sejauh ini proses pembebasan lahan berjalan baik. Ia berulang kali menyebut warga yang lahannya terdampak justru berharap hasil appraisal segera keluar agar mereka bisa secepatnya menerima ganti rugi. (ufl)

Tambahan Rp 210 M dan Desain Enam Lajur

FLYOVER Gedangan disiapkan bukan sekadar untuk mengurai kemacetan hari ini. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan DPRD setempat menyiapkan tambahan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp 210 miliar dalam rancangan APBD 2027, sementara desain jembatan layang dimatangkan dengan enam lajur dua arah agar mampu melayani kebutuhan lalu lintas hingga 30 tahun ke depan.

Anggaran tambahan itu menjadi bagian dari upaya menuntaskan pembebasan lahan sebelum pembangunan fisik dimulai. Di sisi lain, pemerintah juga mematangkan desain flyover agar kapasitas jalan yang dibangun tidak cepat mencapai titik jenuh.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan, mengatakan alokasi tambahan dana itu telah masuk dalam rancangan yang dibahas Tim Anggaran Pemkab Sidoarjo bersama Banggar DPRD Sidoarjo.

"Sekarang ini masih proses pembahasan untuk APBD 2027. Ada anggaran sekitar Rp 210 miliar yang kita siapkan untuk tambahan dana pembebasan lahan dalam proyek pembangunan Flyover Gedangan. Ini masih rancangan, karena masih RAPBD yang belum disahkan menjadi APBD," ungkap Wawan, panggilan Sullamul Hadi Nurmawan.

Menurut politisi PKB asal Sukodono, dana itu masih berpeluang bertambah. Pemkab Sidoarjo dan DPRD Sidoarjo sama-sama berkomitmen agar pembangunan jembatan layang



SURYA/IST

SULLAMUL HADI NURMAWAN

di atas Perempatan Gedangan benar-benar terealisasi.

"Pemkab Sidoarjo yang bertugas membebaskan lahan, sehingga alokasi dananya dari APBD. Dan tentu, kebutuhan dana itu harus kita penuhi. Sebagaimana komitmen kita untuk merealisasikan Flyover Gedangan," tandasnya.

Pemkab Sidoarjo bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merancang skema pembagian anggaran untuk mempercepat pembangunan Flyover Gedangan. Dalam skema itu, pemerintah daerah bertanggung jawab penuh atas pembebasan lahan, sedangkan konstruksi fisik akan didukung anggaran pemerintah pusat.

Melalui APBD 2026, Pemkab Sidoarjo telah mengalokasikan Rp 200 miliar untuk pembebasan lahan. Anggaran itu kemudian ditambah Rp 25 miliar melalui perubahan anggaran keuangan (PAK), sehingga total dana yang disiapkan pada tahun ini mencapai Rp 225 miliar.

Proses pembebasan lahan sedang berjalan. Sebagian lahan akan dibayar pada 2026 menggunakan anggaran tersebut, sedangkan sisanya akan dibayar pada awal 2027 dengan dana yang dialokasikan dalam APBD 2027.

"Langkah itu diambil guna memastikan pembebasan bidang tanah terdampak dapat tuntas tepat waktu sebelum pengerjaan konstruksi fisik dimulai oleh Kementerian PUPR," lanjut politisi PKB tersebut.

Wawan menyebut pembangunan jembatan layang Gedangan sangat mendesak. Kawasan itu telah lama dikeluhkan masyarakat karena menjadi langganan macet, terutama pada pagi dan sore hari. Ia berharap tim pembebasan lahan yang dibentuk Pemkab Sidoarjo bekerja maksimal agar prosesnya selesai sesuai jadwal dan pembangunan fisik oleh Kementerian PUPR dapat berjalan tepat waktu. (ufi)

Pemkab dan BPN Terus Bergerak

PEMBANGUNAN Flyover Gedangan tidak cukup hanya dengan rencana dan anggaran. Pembebasan lahan menjadi pekerjaan penentu agar konstruksi bisa dimulai pada 2027. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) mematangkan tahapan pengadaan tanah, mulai dari pemetaan hingga penetapan lokasi.

Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BM SDA) bersama BPN terus bergerak dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan layang tersebut.

Kepala Dinas PU BM SDA Sidoarjo M Makhmud, mengatakan pihaknya bersama BPN telah menyelesaikan pengukuran titik koordinat sebagai acuan awal pengadaan lahan proyek Flyover Gedangan.

Pengukuran koordinat itu bertujuan menyelaraskan persepsi dan peta perencanaan antara Pemkab Sidoarjo, PT Kereta Api Indonesia (KAI),

serta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN). "Progresnya semakin baik. Pemetaan garis geometris jalan sudah rampung dan bersifat final," kata Makhmud.

Pengukuran mencakup sembilan titik koordinat di sisi selatan dan 12 titik koordinat di sisi utara Persimpangan Gedangan. Total lahan yang akan dibebaskan mencapai 122 bidang dengan luas sekitar 22.220 m2. Area itu mencakup lahan milik warga setempat dan PT KAI.

Setelah pemetaan geometris rampung, Kantor Wilayah BPN Jawa Timur bersama Pemkab Sidoarjo akan bertemu untuk menetapkan lokasi (penlok) sekaligus menerbitkan peta bidang lahan.

Setelah penlok diterbitkan, tim penilai independen atau appraisal akan menghitung besaran ganti rugi. Penilaian mencakup nilai tanah, bangunan, serta aset terdampak lainnya sebelum hasilnya disosialisasikan kepada pemilik lahan.

Makhmud menambahkan, skema



SURYA/M. TAUFIK

PENGUKURAN LAHAN - Petugas Dinas PUBMSDA dan BPN Sidoarjo saat melakukan pengukuran di lahan terdampak flyover Gedangan. total ada 122 bidang lahan yang dibebaskan untuk pembangunan jembatan layang tersebut.

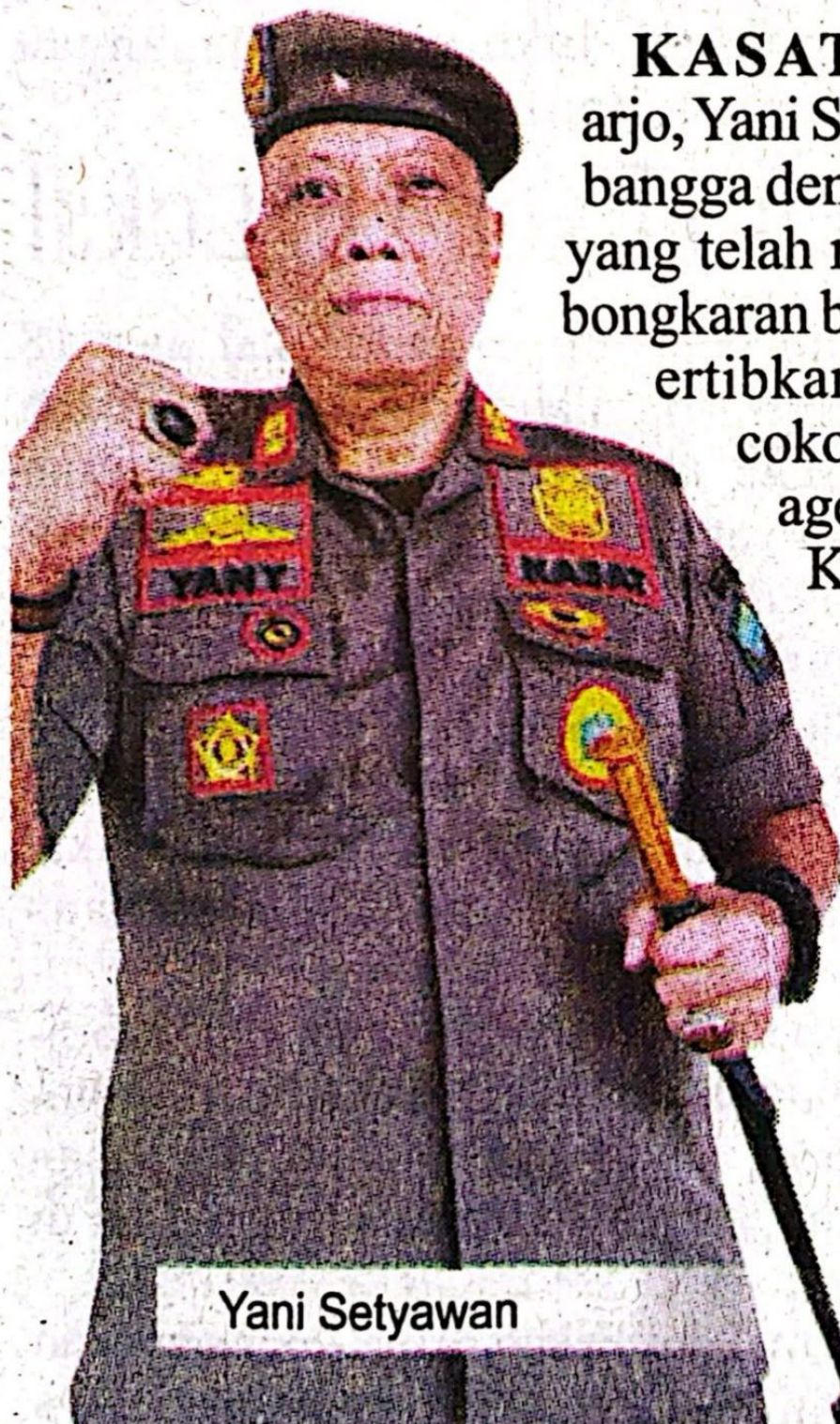
pembebasan lahan akan dilakukan dalam dua tahap, yakni pada tahun anggaran 2026 dan 2027. Pelaksanaannya menyesuaikan kemampuan APBD Sidoarjo. "Skema bertahap ini juga mempertimbangkan aspek sosial masyarakat terdampak agar mereka memiliki waktu cukup untuk mempersiapkan kepindahan ke lokasi baru," ujarnya.

Sebanyak 122 bidang tanah yang

akan dibebaskan terdiri atas 70 rumah usaha, 25 rumah toko (ruko), 12 tanah kosong/saluran/jalan, delapan rumah tinggal, empat kantor, dua rumah dinas, serta satu tempat ibadah. Proses pembebasan lahan ditargetkan selesai tahun ini agar pekerjaan fisik atau pembangunan jembatan layang di atas Perempatan Gedangan dapat dimulai pada 2027.

(ufi)

Bangga Dengan Anak Buah



Yani Setyawan

KASATPOL PP Sidoarjo, Yani Setyawan, mengaku bangga dengan anak buahnya yang telah menjalankan pembongkaran bangunan liar menertibkan PKL yang bercokol di pinggir frontage road, di wilayah Kecamatan Waru sampai Kecamatan Gedangan.

Para anggotanya, yang belum lama ini, meski berpanas-panas di lapangan, di bawah terik matahari, tetap menjalankan tugasnya dengan

►► ke halaman 11

Bangga Dengan Anak Buah

● Sambungan hal 1

ramah, sopan santun dan humanis.

Dipantau tidak sampai ada aksi perlawanan dari para PKL yang membangun bangunan liar semi permanen di sepanjang FTR di Kecamatan Waru hingga kecamatan Gedangan itu.

Pembongkaran bangunan liar di Kecamatan Gedangan hanya berada di Desa Seruni dan Desa Tebel. Sementara di Desa Sawotratap, lancar tidak ada aksi pembongkaran.

Di Desa Seruni dan Desa Tebel memang ada pembongkaran, tetapi bangunan liar yang mereka dirikan beberapa hari sebelumnya sudah dibiarkan kosong oleh para pemiliknya.

“Kami juga berterima kasih kepada petugas keamanan yang membantu membackup Satpol PP dalam menjalankan pembongkaran bangunan liar ini,” kata Yani, yang ikut langsung memantau jalannya penertiban di Desa Seruni dan Desa Tebel.

Ditegaskan oleh Yani Setyawan, pembongkaran bangunan liar di sepanjang FTR yang berada di Kecamatan Waru dan Gedangan itu, karena untuk memperlancar arus lalu lintas dari Surabaya ke Sidoarjo. Yang kemungkinan pada pertengahan Bulan Desember 2026 nanti akan mulai diujicobakan menjelang tahun baru 2027 nanti.

Frontage road adalah program lama dari Pemkab Sidoarjo untuk memperlancar arus lalu lintas dari Surabaya ke kota Sidoarjo. Sebab selama ini jalan raya jalur utama telah macet, dikarenakan banyaknya kendaraan yang melintasinya.

FTR yang bersih dari PKL merupakan merupakan salah satu dari sejumlah usaha untuk memperlancar lalu lintas dari Surabaya ke Sidoarjo.

Pembangunan flyover Gedangan yang sudah operasional, beberapa waktu ini, termasuk rangkaian dalam memperlancar lalu lintas di Kabupaten Sidoarjo.

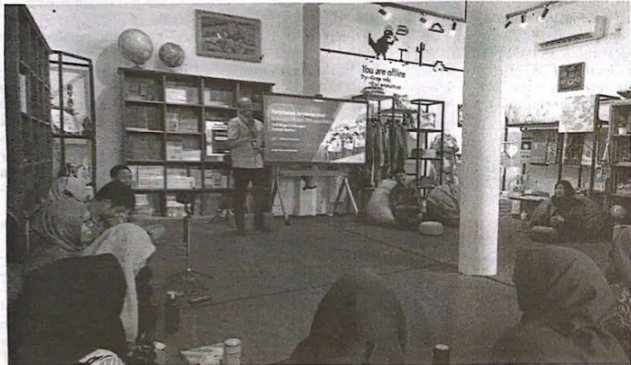
Pada tahun 2027 nanti, usaha memperlancar lalu lintas di Kabupaten Sidoarjo ini, juga akan diingkatkan dengan membangun flyover Gedangan. Lokasinya berada di sisi selatan flyover Aloha. [kus.gat]



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

SLBN Gedangan Berbagi Inovasi Pembelajaran untuk Pendidikan Disabilitas



Kombel SLB Negeri Gedangan Sidoarjo mengadakan kegiatan praktik bertajuk "Berbagi Praktik Baik Sekolah Model Pembelajaran (PM) dan Koding & Kecerdasan Artifisial (KKA) Batch 1".

Komunitas Belajar (Kombel) SLB Negeri Gedangan Sidoarjo mengadakan kegiatan berbagi praktik baik bertajuk "Berbagi Praktik Baik Sekolah Model Pembelajaran Mendalam (PM) dan Koding & Kecerdasan Artifisial (KKA) Batch 1".

Oleh:
Rendy Agung Prakoso, Kab Sidoarjo

Kegiatan diikuti oleh 25 pendidik, acara juga dihadiri oleh dari lima sekolah mitra, yaitu SLB Harmoni, SLB Al Chusnaini, SLB Siti Hajar, SLB Al Azhar, dan SLB Nur Rahmah, Jumat (23/10). Kepala SLB Negeri Gedangan, Pugu Sudarminto menjelaskan implementasi sekolah model PM dan KKA pada lembaga, dimana strategi kepemimpinan pembelajaran melalui pendekatan

IDEAS Framework (Identify needs, Design, Execute, Anchor, Share), cara ini dirancang memastikan setiap inovasi pembelajaran benar-benar menjawab kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus secara berkelanjutan. "Melalui kerangka IDEAS berupaya membangun ekosistem belajar yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan siswa, tapi terstruktur, dapat diper-

tanggungjawabkan, serta disebarluaskan nilainya kepada komunitas yang lebih luas," tuturnya.

Sesi selanjutnya pemetaan dan paparan praktik para pendidik SLB Negeri Gedangan, antara lain Siti Mahmudah penjelasan bertajuk "Box Benda: Satu Kardus Bekas, Enam Jalan Belajar", sebuah inovasi media pembelajaran berbasis bahan bekas yang mampu membuka beragam akses pemahaman bagi siswa, dan Ferdiansyah Widiatmoko membagikan pengalaman integrasi teknologi masa depan melalui praktik baik Pembelajaran Koding & Kecerdasan Artifisial (KKA) yang diintegrasikan pada Mata Pel-

ajaran Matematika. Deretan pendidik inspiratif turut membagikan praktik baik mereka, beragam inovasi dan pengalaman pembelajaran yang dihadirkan para guru tersebut makin memperkaya wawasan serta ragam pendekatan strategi mengajar para peserta. Pendidik inspiratif Dian Ayu Dewayani menambahkan pentingnya wadah berbagi sebagai ruang refleksi bersama bagi para pendidik khusus.

Dian berharap melalui kegiatan Kombel Batch 1 ini dapat terus memantik inspirasi, menguatkan kapasitas pendidik, serta mempererat jejaring kolaborasi antar sekolah khusus di Jawa Timur. [ren.wwn]

Bhirawa



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Bulog Gelar Gerakan Pangan Murah Serentak di Tiga Daerah

Sidoarjo, Bhirawa
Pemimpin Cabang Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya, Nur Fuad Indra Mitra, menegaskan komitmen Bulog untuk terus hadir menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat. Bulog menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak dengan berkolaborasi aktif bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, serta Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.

Dalam acara yang digelar pada 21 Oktober 2026 itu, Perum Bulog menyediakan komoditas pangan pokok berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Meliputi beras SPHP, beras premium merek Punokawan, minyak

goreng (Minyakita, Rosebrand, Fortune), hingga gula pasir.

"Kegiatan ini selain mempermudah masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan pokok dengan harga terjangkau dan berkualitas, juga upaya preventif dalam men-

gendalikan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga pasar," ujar Nur Fuad, di sela-sela ikut memantau acara di Alun-alun Kabupaten Gresik.

Acara yang rutin digelar setiap tahun ini, lanjutnya, sekaligus untuk memperingati Hari Pangan Sedunia. Gerakan pangan murah di wilayah Kota Surabaya digelar di Balai RW Kelurahan Wonokromo. Di Kabupaten Sidoarjo digelar di Kantor Kecamatan Candi. Sedangkan di Kabupaten Gresik digelar di Alun-alun Gresik.

Kabid Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Di-

harapkan kolaborasi itu terus berkelanjutan, karena sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan berkualitas.

Seorang warga Gresik yang ikut berbelanja dalam gerakan pangan murah ini, Wati, juga mengaku senang karena bisa berbelanja kebutuhan pokok rumah tangga dengan harga terjangkau dan berkualitas. "Kami berharap kegiatan ini terus rutin digelar, sebab sangat membantu kami mendapatkan barang kebutuhan dengan mudah, murah, dan berkualitas," ujarnya senang.[kus.ca]



Perum Bulog Surabaya saat menggelar gerakan pangan murah 2026, di pendopo kecamatan Candi, Sidoarjo.

Media
Bhirawa
Media Digital Bhirawa



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Kapolresta Sidoarjo Kunjungi Pengadilan Negeri

Perkuat Sinergitas Antarlembaga Penegak Hukum

Sidoarjo, Memorandum

Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby A. Condoputra terus memperkuat sinergitas dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan lembaga penegak hukum di Kabupaten Sidoarjo. Kali ini, Kapolresta Sidoarjo melakukan kunjungan Sidoarjo Ajak Silaturahmi (SAS) ke Pengadilan Negeri Sidoarjo, Jumat (23/10).

Dalam kunjungan itu, AKBP Bobby didampingi Wakil Kapolresta Sidoarjo AKBP Fahrian Saleh Siregar beserta sejumlah pejabat utama. Rombongan disambut Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, Dr. Ridwan dan jajaran pejabat utama.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Silaturahmi ini menjadi langkah awal Bobby membangun komunikasi dan mempererat hubungan kelembagaan dengan para pemangku kepentingan, khususnya institusi yang memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum.

Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby A. Condoputra mengatakan, kunjungan tersebut merupakan ajang pengenalan diri sebagai pejabat baru sekaligus upaya memperkuat kolaborasi antara Polresta Sidoarjo dan Pengadilan Negeri Sidoarjo.

"Kedatangan kami dalam rangka silaturahmi dan pengenalan diri sebagai pejabat baru di Polresta Sidoarjo. Harapannya, sinergitas antara Polresta Sidoarjo dengan lembaga penegak hukum lainnya semakin solid," ujar Bobby.

Menurutnya, komunikasi dan koordinasi yang baik antarlembaga penegak hukum menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas serta menjaga

situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Dr. Ridwan menyambut baik kunjungan silaturahmi Kapolresta Sidoarjo beserta jajaran. Ia menilai, hubungan yang harmonis dan sinergitas yang kuat antaraparat penegak hukum merupakan modal penting dalam mendukung proses penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan.

Melalui silaturahmi ini, diharapkan koordinasi dan kerjasama Polresta Sidoarjo



Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby A. Condoputra silaturahmi ke Pengadilan Negeri Sidoarjo.

dengan Pengadilan Negeri Sidoarjo semakin erat, sehingga dapat memberikan

dukungan optimal terhadap penegakan hukum serta menjaga stabilitas kamtibmas

demi terciptanya keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sidoarjo. (bwo/jok/fdn)

BANDELL
LED LIGHTING

**DARI SIDOARJO
UNTUK INDONESIA**

**PRODUK LAMPU
KEBANGGAAN SIDOARJO**

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

Gelar Musdes, Warga Mliriprowo Sepakat Copot Kades

Kisruh Pemerintahan Hambat
Pelayanan Masyarakat

SIDOARJO - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama masyarakat Mliriprowo menggelar musyawarah desa (musdes), Sabtu (24/10) malam. Seluruh warga sepakat untuk mengusulkan pencopotan Mamok Widodo sebagai kepala desa (kades). Hasil musdes akan dikirim ke pemkab untuk diproses sesuai aturan.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mliriprowo M Sobri Jaelani mengatakan, usulan pencopotan didasari banyak hal. Persoalan pertanggungjawaban keuangan desa periode 2023-2025 menjadi salah satu sumber polemik. BPD mempertanyakan pengelolaan anggaran setelah sama sekali tidak ada program pembangunan yang berjalan.

"Kami menolak menandatangani APBDes sebelum ada pertanggungjawaban keuangan yang jelas," katanya. Dia menegaskan, tata kelola yang carut-marut juga memengaruhi kondisi internal pemerintahan desa. Hak keuangan perangkat desa belum dicairkan selama 10 bulan. Seperti tunjangan makan Rp 400 ribu per bulan, tunjangan keluarga Rp 290 ribu per bulan, tunjangan jabatan Rp 500 ribu per bulan, serta tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp 1 juta per tahun.

Menurut Sobri, pihaknya tengah menyiapkan kelengkapan dokumen untuk mengajukan usulan pemberhentian kades. Ada 19 berkas yang harus dipenuhi sebelum diserahkan ke pemkab. Dokumen yang disiapkan memuat bukti terkait dugaan penyimpangan selama Mamok menjabat. Semisal, pembangunan drainase yang sudah dianggarkan, tetapi tak direalisasikan. "Saya mau ke bagian hukum dulu untuk pemeriksaan berkas-berkasnya. Kalau sudah dinyatakan lengkap, baru kami bawa ke Pak Bupati," ujarnya.

Warga Kesulitan Mengurus Dokumen

Dampak kisruh pemerintahan tidak berhenti pada urusan anggaran dan tunjangan perangkat desa. Pelayanan administrasi di Balai Desa Mliriprowo ikut terdampak. Warga kesulitan mengurus dokumen yang membutuhkan tanda tangan kades.



**KISRUH
PEMDES
MLIRIPROWO**

- Berawal dari dugaan penyelewengan anggaran
- Tunjangan perangkat mandek 10 bulan
- APBDes gagal disahkan
- Warga sempat demonstrasi memprotes kades

SUMBER: BERIKUT INFORMASI



JORDI TIRIONO/ANJANA POS

Sekretaris Desa Mliriprowo Haris Ridwan mengakui persoalan yang melibatkan kades berimbas pada layanan masyarakat. Sejumlah pelayanan administrasi tidak bisa dise-

lesaikan karena terkendala tanda tangan kades. "Persoalan ini cukup mengganggu. Tidak semua urusan administrasi bisa langsung kami selesaikan," kata Haris. (ful/hen)

Jawa Pos



BPD MLIRIPROWO

RAPAT BERSAMA: Warga Desa Mliriprowo menghadiri musdes yang digelar di balai desa, Sabtu (24/10) malam.



Persoalan ini cukup mengganggu. Tidak semua urusan administrasi bisa langsung kami selesaikan.”

Haris Ridwan
Sekdes Mliriprowo



Muhammad Ainur Rahman
Plh Sekda Sidoarjo



Karena APBDes belum dibuat, dana desa tidak bisa dicairkan.”

Dana Desa Gagal Cair karena APBDes Belum Disahkan

DUA bulan lagi sudah berganti tahun. Namun, hingga kini APBDes Mliriprowo tahun 2026 belum disahkan. Gara-gara perencanaan tak ditetapkan, alokasi dana desa (ADD) dan dana desa gagal dicairkan.

Plh Sekda Sidoarjo Muhammad Ainur Rahman mengatakan, persoalan itu harus segera diselesaikan mengingat waktu pelaksanaan anggaran 2026 tinggal sekitar dua bulan. Dana desa seharusnya digunakan untuk membiayai pembangunan, kegiatan masyarakat dan penye-

lenggaraan pemerintahan desa. “Karena APBDes belum dibuat, dana desa tidak bisa dicairkan,” katanya.

Ainur mengingatkan, keterlambatan penetapan APBDes 2027 juga bisa berdampak pada alokasi dana desa tahun depan. Karena itu, ia meminta BPD dan pemerintah desa segera mencari jalan keluar agar masalah tidak berlarut-larut. “Harus diusahakan selesai, supaya tahun depan bisa tidak terpengang lagi,” tambah Ainur.

Sekdes Mliriprowo Haris Ridwan menyebut, pemo-

tongan anggaran tahun depan mencakup ADD dan dana desa. ADD Desa Mliriprowo yang bersumber dari APBD sebesar Rp 578,19 juta, sedangkan dana desa mencapai Rp 322,75 juta. Jika ditotal anggaran dari dua sumber tersebut mencapai Rp 900,94 juta.

Menurut Aris, tidak cairnya anggaran dari Pemkab dan pemerintah pusat tentu berdampak pada pembangunan. “Program pembangunan tak berjalan karena APBDes tak disahkan,” jelas Aris. (ful/hen)

Jawa Pos

Gaji Ditahan, 16 Pegawai Resto di Taman Mengadu ke Disnaker

Imigrasi Tahan Pemilik Usaha

SIDOARJO – Persoalan hubungan kerja di Resto 116, Taman, berbuntut panjang. Sebanyak 16 pegawai mengadukan pemilik usaha berinisial DW ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sidoarjo. Mereka mempersoalkan gaji yang belum dibayarkan hingga ancaman penalti Rp 16,5 juta setelah memilih keluar dari pekerjaan.

Salah satu pegawai yang bekerja sebagai kasir, Mega Meilinda mengatakan dirinya bersama rekan-rekannya memutuskan berhenti bekerja karena sejumlah persoalan. Namun, keputusan tersebut justru diha-



BELUM BEROPERASI: Resto 116 tutup karena pemilik ditahan setelah tersangkut masalah keimigrasian.

dapkan pada ketentuan penalti dalam kontrak kerja. "Kami semua mencari keadilan, karena dalam kontrak itu kami dipaksa tanda tangan," kata Mega. Selain karyawan aktif, tujuh mantan pegawai Resto 116 juga mengadukan masalah serupa.

Kepala Disnaker Sidoarjo Dwi Eko Saptano menyebut, pihaknya akan meminta klarifikasi. "Akan kami dalam karena informasinya masalah penalti tidak tercantum secara jelas dalam perjanjian kerja di awal," terangnya.

Selain persoalan ketenaga-

kerjaan, DW juga ditahan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda terkait persoalan dokumen keimigrasian. Pihak imigrasi menyebut dokumen izin tinggal yang digunakan DW diduga palsu.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda Agus Winarto menjelaskan bahwa DW sebelumnya mengantongi dokumen izin tinggal terbatas (ITAS) dengan indeks investasi yang mencantumkan PT AJG sebagai penjamin. Namun, hasil penelusuran petugas menemukan dugaan pemalsuan pada dokumen tersebut. "Saat kami telusuri, dokumen pengajuan izin tinggalnya diduga memuat identitas penjamin dan alamat palsu," kata Agus. (eza/ful/hen)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pasang 246 PJU, Dishub Siapkan Rp 4,92 Miliar

SIDOARJO - Masih banyak jalan protokol yang gelap saat malam. Pemkab Sidoarjo menyiapkan anggaran Rp 4,92 miliar untuk membangun 246 titik Penerangan Jalan Umum (PJU) pada 2026. Pemasangan lampu jalan itu tersebar di empat wilayah kawedanan yakni Krian, Porong, Taman dan Sidoarjo.

Kasi Perencanaan Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo Fendi Akhiruddin mengatakan, proyek pemasangan PJU masih dalam proses tender. Pengerjaan



ANGGER BONDAN/JAWA POS

MINIM PENERANGAN: Pemkab akan memperbanyak PJU di frontage road Buduran untuk mencegah kriminalitas.

ditargetkan mulai November. "Anggaran pembangunan dibagi menjadi empat paket pekerjaan dengan nilai yang berbeda," katanya.

Fendi menjelaskan, pemasangan PJU menyasar ruas

jalan yang aktivitas masyarakatnya masih berlangsung hingga malam hari. Sarana juga dipasang di jalur rawan kejahatan. "Penambahan lampu dilakukan bertahap," kata Fendi. (ful/hen)

Jawa Pos

211 Santri se-Gerbangkertokusila Adu Hafalan dan Dakwah di Bilie Fest

SIDOARJO – Sebanyak 211 peserta dari 83 lembaga pendidikan se-Gerbangkertokusila saling adu kemampuan dalam Bilie Fest 1.0 yang digelar SMP Bilingual Terpadu 2 (SMP Bilie), Pesantren Modern Al-Amanah Junwangi, Sabtu (24/10). Kompetisi tersebut mencakup delapan cabang lomba, mulai hafalan Al-Quran, membaca kitab, hingga dakwah dan kesenian Islam.

Bilie Fest 1.0 mengusung tema Santri Berprestasi, Seribu Inspirasi. Dalam pelaksanaannya SMP Bilie menggandeng Kemenag Sidoarjo untuk penerbitan *syahadah tahfidh* bagi santri. "Alhamdulillah, sinergi ini menjadi salah satu bentuk dukungan kami terhadap penguatan kompetensi keagamaan," kata Kepala Kemenag Sidoarjo Dr. Mufi Imron Rosyadi saat membuka acara.

Delapan cabang yang dilombakan meliputi Musabaqah Hifdzil Quran (MHQ) Juz 30, Musabaqah Tartilil Quran, Musabaqah Qiro'atul Kutub, Muhafadzoh Kitab Aqidatul Awam, kaligrafi kontemporer, Pemilihan Da'i Cilik (Pildacil), adzan dan iqamah, serta shalawat banjari. Peserta mulai sekolah dasar, madrasah ibti-



BERPRESTASI: Kepala Sekolah SMP Bilingual Terpadu 2 Mohammad Uil Albab memberikan penghargaan kepada pemenang Bilie Fest.

daiyah, taman pendidikan Al-Quran, hingga pondok pesantren.

Pengasuh Pesantren Modern Al-Amanah Junwangi KH Nurcholis Misbah mengatakan, SMP Bilie selalu berupaya untuk menjadi bagian pencetak santri yang mampu menghafal Al-Quran sekaligus kitab lainnya. "Kami terus berupaya mencetak penghafal Al-Quran, bahkan bisa mengetes langsung para santri untuk mengetahui hafalan mereka," ujarnya.

Sejumlah peserta mencatatkan nilai sempurna dalam

kompetisi tersebut. Muhammad Aflah Umar Al Azizi dari MI Qur'ani Al Majid, Kota Mojokerto, meraih juara pertama MHQ Juz 30 dengan nilai 100. Nilai serupa diperoleh Adelard Yaqub Nashohy dari MI Raudlatul Mutta'allimin 1 Wonokasian, Wonoayu, pada cabang Qiro'atul Kutub. "Melalui Bilie Fest 1.0, kami berharap kompetisi tersebut menjadi ruang bagi santri untuk mengembangkan potensi, meningkatkan kepercayaan diri, dan saling menginspirasi," paparnya. (eza/hen)



Tari SMA Wachid Hasyim 2 Taman



Paskib SMK YPM 11 Wonorejo



Band Umaha



Stan Kopi Tubruk Gadjah menyuguhkan kopi bercita rasa khas dengan aroma yang menggugah selera.

Pengunjung Disuguhi Banyak Penampil Berbakat

SEMARAK Hari Santri dan Bazar UMKM di Parkir Timur GOR Sidoarjo, Minggu (25/10) berjalan lancar. Banyak penampil dari pelajar sekolah YPM tampil. Mereka menunjukkan kreasi seni dan kekompakan saat unjuk gigi.

Sejumlah stan dari para sponsor dan pelaku UMKM banyak dikunjungi masyarakat. Ada yang cek kesehatan gratis hingga mencoba menu-menu kuliner yang ditawarkan oleh UMKM. Acara juga semakin ramai dengan adanya lomba mewarnai tingkat TK. (*)



Banjari SMK YPM 8 Sidoarjo



Penampil dari kiri Alvaro Fernando, Ailka Nallarieta dan Elvira Zahra



Drama Monolog SMK YPM 3 Taman



Stan RSI Siti Hajer



Stan Rumah Sakit Anwar Medika



Stan Kilau Niple



Stan Viva



Stan Bejo Jaje Merah



Stan BFI Finance

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Kades Kalimati Dituding Selewengkan Bansos Beras

KOTA-Tuduhan penggelapan dan penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) beras pangan yang menyeret Kepala Desa (Kades) Kalimati, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, akhirnya mendapat tanggapan langsung.

Kades Kalimati Kisno Mulyono membantah tuduhan yang beredar di media sosial tersebut dan menegaskan bahwa pihak yang menuduh tidak mampu menunjukkan bukti pendukung.

Bantahan itu disampaikan Kisno saat mengikuti hearing bersama Komisi



BUKA SUARA: Hearing Komisi D DPRD Sidoarjo.

D DPRD Sidoarjo, Jumat (23/10) sore. Dalam forum tersebut, ia menjelaskan

bahwa perubahan data penerima bantuan pangan dilakukan berdasar-

kan hasil verifikasi lapangan dan musyawarah desa (musdes), bukan ke-

putusan sepihak pemerintah desa.

Kisno menyebut, tuduhan yang beredar melalui sejumlah platform media sosial, termasuk TikTok, tidak disertai data maupun dokumentasi yang dapat memperkuat dugaan kecurangan.

"Tujuan-tujuan yang katanya penggelapan, penyalahgunaan wewenang, penyelewengan, alhamdulillah hari ini tidak terbukti. Kita sudah punya data, punya tim. Ketika ditanya apakah punya data, punya dokumentasi, ternyata tidak ada," ujarnya. (dik/vga)





MERIAH: Pemberian penghargaan kepada sponsor pendukung acara Semarak Hari Santri dan Bazar UMKM di Parkir Timur GOR Sidoarjo, Minggu (25/10).

Semarak Hari Santri Libatkan UMKM dan Tampilkan Kreativitas Pelajar

KOTA-Semarak Hari Santri dan Bazar UMKM di Parkir Timur GOR Sidoarjo, Minggu (25/10) berlangsung meriah. Kegiatan yang digagas oleh Radar Sidoarjo tersebut melibatkan sekitar 50 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan sekolah Nahdlatul Ulama.

Kegiatan tersebut juga dimekarkan berbagai penampilan seni dan kreativitas pelajar dari sejumlah lembaga pendidikan di bawah Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif (YPM) Sepanjang.

Mulai siswa SMA, SMK hingga mahasiswa Universitas Ma'arif Hasyim Latif (UMAHA) Sidoarjo

turut ambil bagian. Penampilan musik, grup band, dan hadrah banjari menambah semarak peringatan Hari Santri 2026 yang berlangsung hingga siang hari.

Kepala Biro Radar Sidoarjo Vega Dwi Arista mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Radar Sidoarjo untuk berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.

"Ini juga merupakan komitmen

kami dari Radar Sidoarjo untuk ikut membangun dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kami berharap kolaborasi ini terus berkembang sehingga perekonomian masyarakat, khususnya melalui para pelaku UMKM, semakin meningkat," ujarnya.

Vega menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelaku UMKM yang telah berpartisipasi, serta pihak-pihak yang mendukung penyelenggaraan acara. Dia berharap, peringatan Hari Santri yang rutin

digelar setiap tahun tersebut dapat terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Tidak hanya memperkuat semangat kebangsaan dan nilai keagamaan, tetapi juga mendorong Sidoarjo semakin aman, tangguh, dan sejahtera.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sidoarjo Eri Sudewo mewakili Bupati Sidoarjo mengapresiasi inisiatif Radar Sidoarjo bersama sekolah-sekolah Nahdlatul Ulama (NU) dalam menyelenggarakan Semarak Hari Santri dan bazar UMKM tersebut. Foto-foto Semarak Hari Santri di hal 10. (dik/vga)



Jawa Pos

Satpol PP Sita Belasan Miras di Angkringan Tol HK Jabon

■ Tiga Kafe Karaoke Disegel

JABON-Operasi penyakit masyarakat (pekat) yang digelar Satpol PP Kabupaten Sidoarjo bersama TNI-Polri, Sabtu (24/10) malam, menyasar sejumlah titik rawan gangguan ketertiban umum.

Hasilnya, petugas mengamankan sejumlah botol minuman beralkohol (minol) dari sebuah angkringan di kawasan Tol HK, Kecamatan Jabon. Selain itu, tiga kafe karaoke yang tidak mengantongi izin usaha juga disegel.

Operasi gabungan yang melibatkan 164 personel. Petugas bergerak menyisir sejumlah lokasi, mulai Terminal Porong, angkringan



PEKAT: Satpol PP Sidoarjo bersama Komisi A DPRD Sidoarjo sita miras dari angkringan Tol HK Jabon, Sabtu (24/10) malam.

dijalurarteriTanggulangin, hingga angkringan di kawasan Tol HK.

Kepala Satpol PP Kabupaten Sidoarjo Yani Setyawan mengatakan, operasi tersebut difokuskan pada peredaran minuman beralkohol yang berpotensi memicu gangguan keten-

teraman dan ketertiban umum (trantibum).

Menurut dia, kegiatan itu bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama warga yang beraktivitas maupun berwisata di kawasan Porong dan sekitarnya.

"Tujuannya memberi-

kan rasa aman kepada masyarakat. Kami ingin masyarakat yang berwisata di Porong tetap merasa aman dan tidak terganggu dampak minuman keras," ujarnya.

Di angkringan kawasan Tol HK, petugas mengamankan sejumlah minuman beralkohol dari tempat usaha milik Ayum Ningsih.

Barang bukti yang disita terdiri atas dua botol Alexis, satu botol anggur merah, satu botol Api, satu botol Kawa-Kawa, satu botol Arak Bali, satu botol arak ukuran kecil, serta dua botol Bir Bintang.

Petugas juga mendata dua pengunjung yang didapatkan mengonsumsi minuman beralkohol di lokasi tersebut. Identitas keduanya turut diamankan

kan untuk kepentingan pendataan dan penanganan lebih lanjut.

Sementara itu, di Terminal Porong dan angkringan jalur arteri Tanggulangin, petugas memberikan imbauan serta melakukan pemeriksaan terhadap pemilik usaha.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Tibumtranmas) Satpol PP Kabupaten Sidoarjo Raden Novianto Koesno Adi Putro mengatakan, penindakan juga dilakukan terhadap tiga tempat karaoke yang diketahui tidak mengantongi izin usaha. Ketiga lokasi tersebut adalah Wardah Cafe, Labubu Cafe, dan Pelangi Cafe. (dik/vga)



IST
IKON: Bupati Sidoarjo Subandi sedang meninjau lokasi di Desa Wadungasri, Kecamatan Waru, Jumat (23/10).

Pemkab Bakal Bangun Gapura Jenggala Berukuran Besar

■ Di Perbatasan Pondok Candra

* KOTA-Perbatasan Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya bakal memiliki wajah baru. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo berencana membangun Gapura Jenggala berukuran besar di kawasan Pondok Candra, Desa Wadungasri, Kecamatan Waru.

Tak sekadar menjadi penanda batas wilayah, gapura tersebut diproyeksikan menjadi ikon daerah yang mengangkat sejarah dan kearifan lokal Sidoarjo.

Rencana pembangunan gapura berukuran besar itu ditinjau langsung oleh Bupati Sidoarjo Subandi di lokasi, Jumat (23/10). Kawasan tersebut merupakan titik perbatasan Desa Wadungasri, Kecamatan Waru, Sidoarjo, dengan Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya.

Subandi menyampaikan, penataan kawasan perbatasan perlu dilakukan agar batas admi-

nistrasi kedua daerah terlihat lebih jelas. Selain itu, kawasan tersebut diharapkan tampil lebih tertata, estetik, sekaligus memiliki identitas yang kuat.

"Kita ingin mengembalikan nilai-nilai lokal di situ, supaya batas wilayah Surabaya dan Sidoarjo terlihat jelas, sekaligus mengangkat kembali sejarah Sidoarjo," ujarnya.

Secara fisik, Gapura Jenggala direncanakan memiliki lebar minimal 2,5 meter dengan bentang panjang sekitar 7 hingga 8 meter. Namun, dimensi final bangunan masih akan disesuaikan dengan daya dukung dan kondisi riil di lapangan.

Pemkab Sidoarjo akan membahas lebih lanjut rencana tersebut bersama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPU-BMSDA). Pembahasan mencakup pematangan desain agar bangunan tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga merepresentasikan identitas dan narasi sejarah daerah. (dik/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Dewan Apresiasi Satpol PP Tertibkan Miras di Eks Tol, Karaoke Berkedok Warkop Masih Nekat Buka

Editor Moh Junaedi Rizki  • 17 jam lalu • 8 Dilihat •

1 Menit membaca



Berita Delta, SIDOARJO – DPRD Sidoarjo mendukung penuh operasi pekat yang digelar Satpol PP di kawasan eks tol HK.

“Dari Satpol PP, sehingga aktifitas di eks tol HK ini benar-benar steril dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ekonomi tetap berjalan, tapi tata aturan harus kita tegakkan!” tegasnya.

Kasatpol PP Sidoarjo Yany Setyawan mengungkapkan operasi malam ini menasar 3 titik yakni eks tol Porong atau tol buntung, Pasar Porong, dan eks tol Jabon dengan sasaran peredaran miras.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Komisi D DPRD Sidoarjo Hearing soal Bansos Beras di Desa Kalimati, Soroti Transparansi Data Penerima

atim.com

Daerah Pemerintahan dan Kebijakan Politik Nasional Hukum Kesehatan Seni Budaya



Penulis Syaiful Hidayat
Editor Syaiful Hidayat
Jumat, 23 Oktober 2026 23:55 WIB

Admin - Author Info Regulasi
Jumat, 23 Oktober 2026 - 23:55 WIB



Komisi D DPRD Sidoarjo Hearing soal Bansos Beras di Desa Kalimati, Soroti Transparansi Data Penerima Manfaat. (Dok. Syaiful)

AAA

Berita Terkait

- Gapura Jengala Bakal Jadi Ikon Perbatasan Sidoarjo-Surabaya, Ini Rencana Bupati Subandi
- Sambut HSN 2026, Khofifah Pastikan Layanan Kesehatan Gratis Menyentuh Warga Pacitan
- Pansus IV DPRD Sidoarjo Bahas Raperda



Sidoarjo – Komisi D DPRD Sidoarjo menggelar hearing untuk menindaklanjuti keluhan warga terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa beras di Desa Kalimati, Kecamatan Tarik. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah desa menjelaskan perubahan jumlah penerima bantuan serta proses verifikasi data. [Cari Peta Wilayah](#)

Hearing digelar di Ruang Komisi D DPRD Sidoarjo, Jumat (23/10/2026) sore. Rapat dipimpin Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Moch. Dhamroni Chudlori, didampingi Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Kayan dan Wakil Ketua Komisi D Bangun Winarso, serta sejumlah anggota lainnya.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

KETUA DPRD ABDILLAH NASIH, PIMPIN UPACARA HARI SANTRI 2026 DI SIDOARJO

🕒 Oktober 22, 2026 ➡ NEWS

me ADVERTORIAL NEWS OTOMOTIF REDAKSI EKBIS



SIDOARJO, KABARGRESS.COM – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar upacara peringatan Hari Santri Nasional 2026 di Alun-Alun Sidoarjo, Kamis (22/10/2026). Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih memimpin upacara yang diikuti ratusan peserta dari berbagai organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, mahasiswa, pelajar, dan pondok pesantren. Momentum ini menjadi pengingat atas jasa besar ulama dan santri dalam perjuangan agama, bangsa, dan negara.

Sejumlah organisasi turut ambil bagian, di antaranya Pergunu, Fatayat NU, Muslimat NU, Banser, LPBI NU, Sarbumusi, mahasiswa UNUSIDA, Pramuka, IPNU, IPPNU, DPD LDII, PD Muhammadiyah, PC Pagar Nusa, pelajar SMK Plus NU Sidoarjo, serta Ponpes Jabal Noer Taman dan Ponpes Baiturahman Sukodono.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SUBANDI BERSAMA ULAMA DAN SANTRI GELAR MUNAJAT RAYA UNTUK INDONESIA

🕒 Oktober 22, 2026 📁 NEWS



SIDOARJO, KABARGRESS.COM – Memperingati Hari Santri Nasional, Bupati Sidoarjo H. Subandi bersama ulama, santri, dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) menggelar Munajat Raya untuk Indonesia di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (21/10/2026) malam. Kegiatan doa bersama ini digelar serentak melalui Zoom di 18 pendopo kecamatan bersama Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) se-Kabupaten Sidoarjo.

Dari Pendopo Delta Wibawa, Subandi menyapa para ulama dan santri yang mengikuti kegiatan dari masing-masing kecamatan. Sambungan Zoom menghubungkan pusat kegiatan di kabupaten dengan peserta di 18 kecamatan, sekaligus memperkuat kebersamaan dalam memperingati Hari Santri Nasional.



Sidoarjo Ayo Subuhan, Kapolresta Bobby Buka Dialog Warga dan Ingatkan Layanan Polisi 110

TIM 24 OKTOBER 2026



SIDOARJO, KemiriNews.Com – Memakmurkan masjid sekaligus memperkuat keamanan lingkungan, Bupati Sidoarjo Subandi bersama Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby A. Condroputra turun langsung menyapa masyarakat melalui program *Sidoarjo Ayo Subuhan* (SAS).

Melalui salat Subuh berjamaah dan dialog bersama warga, Polresta Sidoarjo mengajak masyarakat mempererat silaturahmi, menjaga kerukunan, serta bersama-sama menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Baca Juga: [SAS Menyapa GKI Sidoarjo! Kapolresta Bobby Perkuat Toleransi Antarumat Beragama](#)

Kegiatan Subuh Keliling tersebut berlangsung di Masjid Al Muttaqin, Garden Dian Regency, Tropodo, Kecamatan Waru, Sabtu (24/10/2026), dengan dihadiri jajaran Forkopimka Waru dan masyarakat setempat.

Shalat Subuh berjamaah dengan program Sidoarjo Ayo Subuhan (SAS) tersebut, dihadiri Bupati Sidoarjo Subandi, Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby A. Condroputra beserta pejabat utama, Forkopimka Waru dan warga setempat.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pemkab Sidoarjo Tata Perbatasan Surabaya, Gapura Ikonik hingga PKL dan Parkir Liar Jadi Sasaran

PEMKAB

Oleh **admin**

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 06:44 WIB · 3 menit baca



metrocakrawala.id || SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo berencana menata kawasan perbatasan Sidoarjo–Surabaya dengan membangun gapura berukuran besar. Penataan ini tidak hanya bertujuan mempertegas batas wilayah administratif, tetapi juga mengangkat identitas sejarah dan kearifan lokal Sidoarjo.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Momentum Bulan Bahasa: PKS Sidoarjo Launching Pojok Baca serta Luncurkan Buku “Aku dan PKS”

25 Oktober 2026 19:22 WIB -
oleh redaksi



Kabid Seni dan Budaya DPD PKS Sidoarjo, Novi Larasati (kanan) dan Friska Roza Vittiana bersama ketiga putrinya di ruang Pojok Baca

Sidoarjo, petisi.co - Bertujuan membangkitkan kembali budaya masyarakat gemar membaca buku dan karya tulis, Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Sidoarjo me-launching ruang Pojok Baca, Minggu (25/10/2026).

Kabid Seni dan Budaya DPD PKS Sidoarjo, Novi Larasati, S.S, M.Pd mengatakan Pojok Baca hadir menjawab keresahan dan kegelisahan para kader melihat turunnya minat baca masyarakat terhadap literasi media cetak. Terlebih di era digital, gadget diakui mendominasi penguasaan informasi.

"Pojok Baca sebagai jawaban atas kegelisahan para kader PKS melihat minat masyarakat dalam membaca buku mulai tergerus oleh derasnya arus informasi di ruang digital. Padahal materi atau bacaan yang tersaji di gadget belum tentu semuanya akurat dan benar," ungkap Novi.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

PWI Sidoarjo Ajak Pemuda dan Media Angkat Potensi Wisata, DPRD Dorong Destinasi Terpadu



Redaksi
23 Oktober 2026



SIDOARJO – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sidoarjo berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar dialog publik bertema “Dari Literasi ke Destinasi: Pemuda dan Media Mengangkat Potensi Pariwisata Daerah” di Gedung Youth Center Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo, Jumat (23/10/2026).

Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah daerah, legislatif, insan pers, komunitas ekonomi kreatif, pelaku industri pariwisata, serta generasi muda untuk membahas strategi pengembangan dan promosi destinasi wisata di Kabupaten Sidoarjo.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Diduga Tabrak Peraturan Musdes dan Temukan 177 Data Penerima Bermasalah, Penyaluran Bantuan Kalimati Diadukan Dewan

 Republikjatim.Com
Sabtu, 24 Okt 2026 14:34 WIB



Sidoarjo (republikjatim.com) – Dugaan pelanggaran prosedur dan semrawutnya data penerima bantuan pangan beras 30 kilogram di Desa Kalimati, Kecamatan Tarik, Sidoarjo berbuntut panjang. Persoalan ini akhirnya memicu masalah hingga menggelar Rapat Dengar Pendapat (hearing) di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Sidoarjo, Jumat (23/10/2026).

Rapat dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Sidoarjo H Kayan, Ketua Komisi D M Dhamroni Chudlori dan Sekretaris Komisi D Bangun Winarso serta dihadiri Kepala Desa Kalimati, jajaran Dinas Sosial, Dinas Pangan dan Pertanian, hingga perwakilan warga setempat.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ribuan Anak Padati Lapangan Pasmar 2, Bunda PAUD Sidoarjo Tekankan Pintar Bisa Dipelajari, Kejujuran Harus Dicetak Dini

Republikjatim.Com
Sabtu, 24 Okt 2026 17:03 WIB



Sidoarjo (republikjatim.com) – Suasana Lapangan Pasmar 2 Gedangan, Sidoarjo tampak semarak dan penuh keceriaan, Sabtu (24/10/2026). Tidak kurang dari 5.000 anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) bersama para guru se-Kabupaten Sidoarjo berkumpul dalam gelaran Festival ASi BERLIAN (Anak Sidoarjo Beriman, Sehat, Riang, Terindungi, Aktif, Kreatif, Nalar Kritis).

Di tengah antusiasme ribuan anak dan pendidik, Bunda PAUD Kabupaten Sidoarjo, Sriatun Subandi memberi pesan mendalam mengenai pentingnya pembentukan karakter pada usia emas (golden age). Sriatun menjelaskan pendidikan untuk anak-anak tidak boleh hanya berfokus pada keahlian akademis atau keterampilan semata. Akan tetapi, juga harus seimbang dengan penanaman kejujuran dan akhlak mulia.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sidak Dewan Sidoarjo di Sejumlah Karaoke di Eks Tol Jabon Diduga Bocor, Karaoke Segelan Buka Lagi Usai Petugas Pergi

 Republikjatim.Com
Minggu, 25 Okt 2026 17:13 WIB



Sidoarjo (republikjatim.com) - Upaya penertiban tempat hiburan malam (karaoke) tak berizin di kawasan eks Tol Jabon oleh tim gabungan Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo bersama Satpol PP, TNI/Polri serta PC GP Ansor Sidoarjo, Sabtu (24/10/2026) malam diduga kuat telah bocor.

Sidak yang dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, H Rizza Ali Faizin, bersama Kasatpol PP Sidoarjo Yany Setyawan dan Ketua PC GP Ansor Sidoarjo Choirul Mu'minim itu, menemukan fakta mengejutkan. Salah satunya, mayoritas tempat karaoke berkedok Warung Kopi (Warkop) mendadak tutup rapat saat petugas tiba di lokasi.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sentuhan Hangat di Waru, Bupati Subandi Turun Langsung Bedah Rumah dan Bagikan Kursi Roda Warga Tak Mampu

 Republikjatim.Com
Sabtu, 24 Okt 2026 09:38 WIB



Sidoarjo (republikjatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus menancapkan gas dalam mempercepat program jaring pengaman sosial dan perbaikan infrastruktur pemukiman warga kurang mampu. Menjelang masuknya puncak musim hujan, Bupati Sidoarjo Subandi turun langsung menyusuri gang-gang desa di Kecamatan Waru untuk menyerahkan Bantuan Sosial (Bansos) dan meninjau Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Jumat (23/10/2026).

Aksi tanggap cepat ini, menyasar enam penerima manfaat yang tersebar di empat desa. Yakni Desa Janti, Kureksari, Kedungrejo dan Desa Bungurasih. Dua keluarga dipastikan mendapatkan bantuan bedah rumah total. Sementara empat warga lansia dan disabilitas menerima bantuan kursi roda untuk menunjang mobilitas mereka.



Jelang Konfercab XXII NU Sidoarjo, Tiga Nama Mencuat sebagai Kandidat Ketua Tanfidziyah

wartanusa 26 Oktober 2026



SIDOARJO — Menjelang Konferensi Cabang (Konfercab) XXII Nahdlatul Ulama (NU) Sidoarjo, sejumlah nama mulai diperbincangkan sebagai calon Ketua Tanfidziyah PCNU Sidoarjo untuk masa khidmat lima tahun mendatang. Tiga nama yang disebut-sebut adalah petahana KH Zainal Abidin, H. Suwarno HB, S.Pd., dan H. Sugiono Al-Hafidz.

Konfercab XXII PCNU Sidoarjo dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026 atau paling lambat Januari 2027. Saat ini, jajaran Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sidoarjo telah menggelar rapat untuk membahas draf dan berbagai persiapan menuju forum tertinggi NU di tingkat cabang tersebut.

Pada Konfercab XXI, PCNU Sidoarjo menetapkan kepengurusan masa khidmat 2021–2026 yang dipimpin Rais Syuriyah KH R. Abdus Salam Mudjib dan Ketua Tanfidziyah KH Zainal Abidin.

